

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
22 – 28 Februari 2021

LULUK'S UPDATE

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

Moratorium Sawit

Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat

- Dua tahun terakhir ini Provinsi Papua Barat dan KPK melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Evaluasi ini bagian dari program Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK
- Evaluasi dilakukan pada **24 perusahaan pemegang izin**
- **Total luas konsesi 576.090,84 ha.** Di dalamnya terdapat **383.431,05 ha wilayah bervegetasi hutan yang masih bisa diselamatkan.**
- Perusahaan berlokasi di 8 kabupaten yaitu Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Fakfak.

- Evaluasi perizinan ini dimulai sejak Juli 2018 dengan berlandaskan 3 instrumen kebijakan :
 1. Deklarasi Manokwari
 2. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit)
 3. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).
- Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini oleh Gubernur Papua Barat didorong untuk dikelola oleh masyarakat adat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

- Dari hasil evaluasi, mayoritas perusahaan belum beroperasi. Artinya, perizinan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut masih belum lengkap dan belum melakukan penanaman.
- Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat wilayah-wilayah konsesi yang secara legal berpotensi untuk dicabut perizinannya.
- Pencabutan izin ini bisa dilakukan karena sejumlah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan perizinan yang diperoleh, khususnya Izin Usaha Perkebunan.
- Selain itu, sejumlah perusahaan tersebut juga belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sama sekali. Sehingga terbuka kesempatan untuk dapat menyelamatkan tutupan hutan di Tanah Papua.
- Dari hasil evaluasi perizinan ini, tim Evaluasi menyampaikan rekomendasi kepada para Bupati sebagai pemberi izin dan juga rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit kepada kementerian/lembaga terkait.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Enam Arahkan Presiden Untuk Pencegahan Karhutla

Pada 22 Februari 2021 Presiden memberikan arahan dalam Rakornas Karhutla Tahun 2021

- **Pertama**, memprioritaskan upaya pencegahan.
 - **Kedua**, agar infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah.
 - **Ketiga**, meminta dicari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang. Peralnya 99% kebakaran hutan itu adalah ulah manusia baik yang disengaja atau tidak.
 - **Keempat**, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Perintah ini sudah disampaikan kepada BRGM.
- Kawasan hidrologi gambut dipastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. Membuat banyak embung, kanal, sumur bor serta berbagai teknis pembasahan lain. Sehingga lahan gambut tetap basah.

- ***Kelima***, meminta agar jangan sampai api membesar. Agar penanganan tidak terlambat.
- ***Keenam***, penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.

Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu di konsesi milik perusahaan maupun di masyarakat. Menerapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana

- Menko Polhukam melaporkan telah terjadi penurunan karhutla secara signifikan pada tahun 2020.
- Karhutla tahun 2020 : 296.942 ha
- Karhutla tahun 2019 : 1.592.010ha
- Karhutla tahun 2015 : 2,61 juta ha

Daerah Yang Telah Menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla 2021

• Provinsi Riau

mulai 15 Februari hingga 31 Oktober 2021

7 Daerah di Riau yang sudah menetapkan Status Siaga Karhutla 2021

1. Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Kabupaten Siak
3. Kabupaten Bengkalis
4. Kabupaten Rokan Hilir
5. Kabupaten Indragiri Hilir
6. Kota Dumai
7. Kabupaten Pelalawan

• Provinsi Kalbar

Kabupaten yakni Sanggau dan Ketapang, yang sudah menetapkan status siaga karhutla

Luas Lahan Yang Terbakar di 2021

Di Provinsi Riau

- BPBD Provinsi Riau mencatat luas lahan yang terbakar di Riau dari Januari - 22 Februari 2021 mencapai 248,95 ha
- Paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis (82 ha), disusul Siak (45 ha), Kota Dumai (40 ha), Indragiri Hilir (40 ha), Pelalawan (26 ha), Meranti (4 ha), Indragiri Hulu (5 ha), dan Rokan Hilir (5 ha).

Di Provinsi Kalbar

- Dinas LHK Provinsi Kalbar mendata sekitar 90 ha lahan terbakar di 2021

UU Cipta Kerja

Peraturan Pelaksana UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja

- Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja
- Ini sesuai Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 bulan sejak diberlakukan pada 2 November 2020.
- Peraturan pelaksanaan yang pertama diselesaikan adalah PP terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
- Selanjutnya, 49 peraturan pelaksanaan, terdiri 45 PP dan 4 Perpres yang disusun oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

11 Klaster Pengaturan

Secara substansi, peraturan pelaksanaan dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan

- 1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP
- 2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
- 3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres
- 4. Ketenagakerjaan: 4 PP
- 5. Fasilitas Fiskal: 3 PP
- 6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres
- 7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
- 8. Lingkungan Hidup: 1 PP
- 9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres
- 10. Kawasan Ekonomi: 2 PP
- 11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres

Implementasi Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

- PP dan Perpres yang telah disahkan sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja telah dapat dioperasionalkan atau diimplementasikan, namun K/L akan melakukan penyesuaian untuk petunjuk teknis pelaksanaan (misalnya terkait SDM, anggaran, dan organisasi). Pengaturan teknis tersebut tidak akan mengganggu implementasi PP dan Perpres.
- Sedangka, terkait implementasi dalam Sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan peningkatan sistem dan akan dapat berjalan sepenuhnya paling lambat 4 bulan setelah PP ditetapkan atau sekitar Juli 2021.
- Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait.

12 Potensi Risiko UU Cipta Kerja Versi IPB University

- IPB University menemukan adanya 12 potensi risiko yang bisa muncul pada implementasi UU Cipta Kerja (UUCK), khususnya terkait dampak terhadap lingkungan, petani, nelayan kecil, dan masyarakat adat.
- Ke-12 potensi risiko tersebut ditemukan oleh Tim Kajian IPB yang beranggotakan 34 pakar pada kajian kritis IPB terhadap konten UUCK.
- Ini didasarkan pada kajian terhadap 78 UU asal yang terdampak UU Cipta Kerja. Dan difokuskan pada analisis terhadap 30 UU yang terkait dengan sumber daya alam (SDA).
- **Pertama**, rencana detail tata ruang (RDTR) dan bias kota. Pada UU asal yang terdampak, ada pasal-pasal yang terkait dengan desa dihapus. Penataan ruang kawasan desa kemudian diatur dalam aturan turunannya, yakni peraturan pelaksana.
- **Kedua**, resentralisasi kewenangan tata ruang. Di setiap daerah ada aturan daerah mengenai tata ruang, tapi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja aturan itu dihapus dan dikendalikan pemerintah pusat.

- ***Ketiga***, ancaman degradasi keanekaragaman hayati dan kontaminasi pangan.
- ***Keempat***, ancaman kedaulatan pangan berbasis impor.
- ***Kelima***, sentralisasi perizinan berusaha.
- ***Keenam***, pengarusutamaan investasi dari pada kelestarian lingkungan
- ***Ketujuh***, ketidakjelasan definisi subyek dan objek agromaritim.
- ***Kedelapan***, kerentanan sumber nafkah agraria.
- ***Kesembilan***, dilema reforma agraria dengan proyek strategis nasional.
- ***Kesepuluh***, peningkatan eskalasi konflik dan ketimpangan agraria.
- ***Kesebelas***, UU Cipta Kerja sarat liberalisasi pemanfaatan sumber daya (nasionalisme).
- ***Keduabelas***, dampak lanjutan dari pelemahan sanksi.

Referensi

- <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/22/337/2366349/6-perintah-jokowi-cegah-karhutla-di-indonesia>
- https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/386942-perizinan-kebun-sawit-papua-barat-dievaluasi-cegah-kerusakan-sda
- <https://tirto.id/kpk-dorong-pelaksanaan-rekomendasi-evaluasi-izin-sawit-papua-barat-gaCP>
- <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPZamPk-kpk-dorong-pelaksanaan-evaluasi-perizinan-kelapa-sawit-di-papua-barat>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60376e99419f4/izin-24-perusahaan-kelapa-sawit-bermasalah-di-papua-barat-dievaluasi>
- <https://tirto.id/bpbd-karhutla-riau-luas-lahan-yang-terbakar-capai-2489-hektare-gazv>
- <https://www.antaranews.com/berita/2015118/luas-lahan-yang-terbakar-di-riau-mencapai-248-hektare>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya>
- <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/enam-arahan-presiden-dalam-rakornas-pengendalian-karhutla-2021/>
- <https://www.jpnn.com/news/gubernur-kalbar-tetapkan-status-siaga-darurat-karhutla>
- <https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1631498407/ini-solusi-dari-gubernur-kalbar-untuk-dua-daerah-yang-siaga-darurat-karhutla>
- <https://kalbar.antaranews.com/berita/460089/pemkot-pontianak-tetapkan-status-siaga-karhutla>
- <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/amp/pr-1171511582/tahun-2021-luasan-lahan-terbakar-di-kalbar-mencapai-90-hektare>
- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-baru-uu-cipta-kerja-masa-berlaku-aturan-turunan-dan-potensi-risikonya-1vDkARaxtil/full>

Madani

